



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRKHAM WIDIYONO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM
3. NHK : 804024

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **833.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.135 m²/120 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 333 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 190 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
4. Tanah Seluas 222 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
5. Tanah Seluas 1.910 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 286.500.000
6. Tanah Seluas 706 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **231.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MOBIL PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000



4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

5. MOBIL, HONDA BRI RS 1.2 CVT CKD Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 158.148.679

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.228.448.679

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.228.448.679

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.